Sociale : Journal of Social and Political Sciences
Vol. 2, No. 1, June 2026
e-ISSN: 3110-5637 (online)
https://jurnal.sinesia.id/index.php/sociale

Reproduksi Styrotype Politik Gender Dan Framing Media Dalam Debat Pilkada Banten Tahun 2024

Reproduction of Gender Politics Styrotype and Media Framing In The 2024 Banten Regional Election Debate

Tubagus Fauzan Kamil[1], Khalishah Zahra Khairina[2], Ika Arinia Indriyany[3]
E-mail Korespondensi : 6670230055@untirta.ac.id
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten, Indonesia

Info Article
|Submitted: 18 March 2026**|Revised**: 27 April 2026**|Accepted**: 2 May 2026
|Published: 2 May 2026
How to cite: Tubagus Fauzan Kamil, etc., "Reproduksi Styrotype Politik Gender Dan Framing Media Dalam Debat Pilkada Banten Tahun 2024", *Sociale : Journal of Social and Political Sciences*, Vol. 2 No. 1, 2026, p. 181-197.

ABSTRACT

Electoral democracy should be a space for contestation for competing ideas and policy programs based on the principle of equality, but in its application, discussions about politics often reproduce gender stereotypes that doubt the legitimacy of women's leadership. The phenomenon that occurred shows in the dynamics of the 2024 Banten Regional Election debate which is able to give rise to statements containing sexist elements and potentially delegitimize women's political authority. This study aims to analyze the reproduction of gender stereotypes in debate discourse and how media framing shapes the construction of meaning and legitimacy of these statements in the public space. The method used in this study is a literature study with a qualitative approach and an analysis of interpretive discourse related to debate broadcasts, online media reports, and existing academic literature related to gender and politics. The results of the study show that sexist speech in debates is not only political rhetoric, but can serve as a mechanism of symbolic violence that reproduces patriarchal stereotypes and can cast doubt on women's leadership capacity. In addition, the media framing that places such statements as political controversies without attributing them. These findings confirm that the quality of democracy is not always determined by electoral mechanisms, but also about the extent to which political space can guarantee legitimacy and equality for women in political discourse.

Keyword: *Gender Stereotypes; Media Framing Banten Regional Elections 2024*

ABSTRAK

Demokrasi elektoral seharusnya dapat menjadi ruang kontestasi untuk saling beradu gagasan dan program kebijakan dengan berlandaskan prinsip kesetaraan, akan tetapi dalam penerapannya pembicaraan mengenai politik seringkali mereproduksi stereotip gender yang meragukan legitimasi kepemimpinan perempuan. Fenomena yang terjadi menunjukkan dalam dinamika debat Pilkada Banten 2024 yang mampu memunculkan pernyataan mengandung unsur seksis dan berpotensi mendelegitimasi otoritas politik perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reproduksi stereotip gender dalam wacana debat serta bagaimana framing media membentuk konstruksi makna dan legitimasi terhadap pernyataan tersebut dalam ruang publik. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif dan analisis wacana interpretatif terkait tayangan debat, pemberitaan media daring, serta literatur akademik yang ada terkait gender dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya ujaran yang ber-unsur seksis dalam debat tidak hanya merupakan retorika politik semata, tetapi dapat berfungsi sebagai mekanisme kekerasan simbolis yang mereproduksi kembali stereotip patriarki dan dapat meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan. Selain itu, framing media yang menempatkan pernyataan tersebut sebagai kontroversi politik tanpa mengaitkannya. Temuan ini menegaskan bahwasannya kualitas demokrasi tidak selalu ditentukan oleh mekanisme pemilu, tetapi juga mengenai seberapa jauh ruang politik dapat menjamin legitimasi dan kesetaraan bagi perempuan dalam wacana politik.

Kata Kunci: *Stereotip Gender; Framing Media; Pilkada Banten 2024*

This work is licensed under CC BY-SA 4.0

Pendahuluan

Demokrasi elektoral di tingkat lokal idealnya dibangun sebagai arena untuk kontestasi ide dan program kebijakan daripada ruang untuk mereproduksi identitas dan stereotip sosial. Namun, dalam praktiknya, persaingan politik di Indonesia terus ditandai dengan narasi gender yang mempertanyakan legitimasi perempuan sebagai pemimpin politik baik lokal ataupun nasional (Rambe et al, 2025). Dinamika ini terbukti selama debat gubernur Banten 2024, di mana muncul pernyataan yang secara implisit meragukan kapasitas kepemimpinan perempuan berdasarkan ekspektasi peran gender. Insiden tersebut tidak dapat dibenarkan sebagai strategi retorika politik elektoral. Sebaliknya, mereka mencerminkan hubungan kekuasaan patriarki yang lebih dalam yang tertanam dalam budaya politik lokal (Qorry et al, 2025). Seksisme beroperasi tidak hanya sebagai opini individu tetapi sebagai mekanisme sosial-politik yang membangun otoritas, kredibilitas, dan legitimasi di sepanjang garis gender (Hasanah et al, 2025).

Secara konseptual, kekerasan berbasis gender dalam politik mengacu pada tindakan atau praktik yang menargetkan perempuan karena jenis kelamin mereka, dengan maksud untuk membatasi partisipasi mereka atau merusak otoritas politik mereka (Rajab, 2018). Krook (2020) dalam karyanya berjudul *Violence Against Women in Politics* (2020) menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik tidak terbatas pada cedera fisik tetapi mencakup bentuk psikologis dan simbolis yang bertujuan untuk mengecualikan perempuan dari kekuasaan politik. Perspektif ini memperluas lensa analitis, memungkinkan wacana seksis dalam debat elektoral dipahami sebagai bentuk kekerasan politik. Melengkapi pandangan ini, Bourdieu (2001) mengkonseptualisasikan kekerasan simbolis sebagai bentuk dominasi halus yang dilakukan melalui bahasa, representasi, dan sistem makna yang tampak sah dan alami. Melalui mekanisme ini, stereotip yang menggambarkan perempuan sebagai lemah, emosional, atau tidak cocok untuk kepemimpinan menjadi normal, sehingga mereproduksi hierarki gender tanpa paksaan terbuka (Melayu & Eriyanti, 2024).

Penelitian terdahulu tentang gender dan politik di Indonesia terutama berfokus pada representasi dan partisipasi formal. Studi oleh Adriani dan Maulia (2024) dan Aula (2023) menyoroti kesenjangan yang terus-menerus dalam representasi politik perempuan meskipun ada kebijakan tindakan afirmatif. Wildianti dan Ramadhana (2024) lebih lanjut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pemilu berdampak negatif pada partisipasi dan representasi politik perempuan. Febriyanti dan Rahmatunnisa (2022) mengidentifikasi stereotip patriarki sebagai sumber mendasar ketidakadilan gender yang terus direproduksi melalui praktik sosial. Sementara itu, penelitian tentang representasi media oleh Juwita et al. (2024) dan Makiyah dan Qisthina (2024) mengungkapkan bahwa media framing sering memperkuat bias gender

dengan mereproduksi penggambaran stereotip perempuan dalam wacana publik. Meskipun studi ini berkontribusi secara signifikan untuk memahami ketidaksetaraan gender, sebagian besar berfokus pada hambatan struktural atau representasi deskriptif, meninggalkan praktik diskursif dalam debat elektoral lokal yang kurang dieksplorasi sebagai mekanisme kekerasan simbolis (Jannah, 2021).

Partisipasi perempuan dalam politik Indonesia menunjukkan penignkatan signifikan pada tahap pencalonan, dengan jumlah caleg perempuan mencapai 37,01%. Namun, tingginya partisipasi tersebut tidak sejalan dengan hasil keterwakilan di parlemen, karena perempuan yang berhasil memeroleh kursi DPR RI periode 2024-2029 hanya sebesar 21,9 % dari ambang batas kuota afirmatif 30% (Rambe et al., 2025). Data empiris tentang representasi politik perempuan di Indonesia menggambarkan paradoks dalam demokrasi prosedural. Meskipun kuota gender 30 persen telah diadopsi secara resmi, representasi perempuan dalam posisi kepemimpinan eksekutif tetap relatif rendah (Arawi, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa hambatan bagi kemajuan politik perempuan tidak terbatas pada akses kelembagaan tetapi meluas ke masalah legitimasi budaya dan pengakuan simbolis (Paramesti & Vandito, 2026). Ketika pernyataan seksis muncul dalam forum debat resmi dan tidak secara eksplisit dikategorikan sebagai kekerasan politik berbasis gender, maka normalisasi perilaku tersebut dapat terjadi (Mardlatillah, 2022). Kekerasan struktural, ketimpangan dipertahankan melalui norma-norma sosial dan keyakinan budaya yang menaturalisasi dominasi laki-laki (Aula, 2023). Namun, dalam kasus debat Gubernur Banten, mekanisme yang paling terlihat adalah kekerasan simbolis yang diberlakukan melalui wacana daripada pengucilan kelembagaan.

Berdasarkan konteks ini, penelitian ini secara khusus mengkaji bagaimana pernyataan seksis dalam debat gubernur Banten 2024 berfungsi sebagai mekanisme kekerasan simbolis yang mendelegitimasi otoritas politik perempuan, dan bagaimana pembingkaian media dan respons publik berkontribusi pada normalisasinya. Fokus ini sangat penting karena kualitas demokrasi lokal tidak boleh dinilai semata-mata melalui prosedur pemilu, tetapi juga melalui kapasitasnya untuk memastikan kesetaraan gender yang substantif dalam wacana politik (Ayu & Anjani, 2026). Selanjutnya, penelitian ini berupaya mengevaluasi peran media dan wacana publik dalam membentuk makna dan legitimasi pernyataan tersebut, sehingga menilai apakah praktik demokrasi lokal memperkuat atau menantang struktur kekuasaan patriarki (Nokia et al., 2025).

Studi ini menawarkan kontribusi spesifik dengan memposisikan wacana seksis dalam debat pemilu lokal sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik, khususnya dalam kerangka teori yang dikembangkan oleh Krook (2020). Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya pada praktik diskursif terutama pernyataan seksis dalam debat politik formal sebagai manifestasi konkret

kekerasan politik berbasis gender dalam konteks lokal Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang sebagian besar menekankan hambatan struktural, kesenjangan representasi, atau dimensi kelembagaan, penelitian ini menyoroti bagaimana bahasa politik sehari-hari berfungsi sebagai mekanisme pengucilan dan delegitimasi. Dengan menggunakan kerangka teori Krook, penelitian ini menggarisbawahi bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik tidak terbatas pada bentuk fisik atau terang-terangan tetapi juga mencakup praktik halus dan normal yang merusak otoritas politik perempuan. Pendekatan ini penting dan relevan karena mengungkapkan bagaimana ruang demokrasi yang diharapkan inklusif dapat secara bersamaan mereproduksi ketimpangan gender melalui wacana, sehingga isu ini penting untuk diperiksa dalam rangka menilai kualitas substantif demokrasi lokal.

Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami makna, konstruksi wacana dan relasi kuasa yang terdapat pada praktik seksisme pada debat Pilgub Banten 2024. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan fenomena kekerasan berbasis gender dalam politik secara kontekstual, mendalam, dan berbasis teori (Niron & Seda, 2021). Lalu pada penelitian ini akan menganalisis bagaimana sebuah ujaran politik bekerja sebagai instrumen delegitimasi terhadap perempuan dalam ruang demokrasi lokal (Sumarheni, 2025).

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan. Di mana penelitian ini bertumpu pada penelahaan sistematis terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan seperti jurnal ilmiah, pemberitaan media, buku terkait gender dan politik dan dinamika respons publik terhadap debat Pilgub banten 2024. Melalui metode ini, data dapat dianalisis secara interpretatif dengan mengaitkan temuan empiris dalam teks dan pemberitaan dengan kerangka teori yang digunakan (Mandasari, 2023). Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode hasil media brief, artikel, dan studi kepustakaan secara terstruktur. Data utama diperoleh dari tayangan resmi debat Pilgub Banten 2024, serta pemberitaan media daring yang memuat kutipan pernyataan para kandidat. Data tersebut dianalisis untuk menemukan indikasi ujaran yang mengandung unsur seksisme atau delegitimasi berbasis identitas gender (Bintari, 2021).

Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa artikel jurnal, laporan pemantauan terkait ujaran kebencian, serta tulisan media yang membahas respons publik terhadap debat tersebut. Pemilihan sumber dilakukan secara selektif berdasarkan relevansinya dengan isu kekerasan berbasis gender dalam politik. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis wacana interpretatif (Sari &

Pattipeilohy, 2020). Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana penggunaan bahasa, representasi, dan framing media berperan dalam membentuk persepsi publik sekaligus mempertahankan struktur relasi kuasa patriarkal dalam praktik demokrasi lokal (Santi, 2020).

Penelitian ini dikakukan pada periode Januari-Maret 2026, dengan menganalisis tayangan debat Pilkada Banten 2024 serta pemberitaan media daring yang dipublikasikan selama dan setelah pelaksanaan debat berlangsung. Penelitian ini difokuskan pada analisis reproduksi streotipe gender dalam debat Pilkada Banten 2024. Batasan penelitian mencakup identifikasi ujaran yang mengandung bias atau strereotip gender, analisis mekanisme reproduksi makna dalam diskursus politik. Penelitian ini tidak membahas aspek elektoral secara kuantitatif seperti hasil pemilihan, perilaku memilih, atau strategi kampanye, tetapi secara spesifik menelaah dimensi representasi dan konstruksi makna dalam konteks gender dan politik.

Hasil dan pembahasan

1. 1. Identifikasi Ujaran Seksis dalam Debat Pilgub Banten 2024

Peneliti menemukan bahwa adanya beberapa segmen yang peneliti tonton dalam gelaran Debat Pilkada 2024 sekaligus yang beredar di media sosial, jurnal, dan beberapa web berita sebagai sumber rujukan peneliti yang valid menunjukkan dalam debat Pilgub Banten 2024 terdapat ujaran yang secara implisit mempertanyakan kapasitas kepemimpinan perempuan dengan merujuk pada sterotip gender (Abbas et al., 2023). Perkataan cawagub Banten mengatakan bahwa "Maka sebab itu wanita jangan terlalu dikasih beban berat. Apalagi jadi gubernur itu berat," kata Dimyati saat debat Pilkada Banten 2024, Rabu, (16/10/2024). Ujaran yang ditemukan tidak berbentuk penghinaan secara langsung, tetapi ditemukan diksi yang meragukan kemampuan perempuan untuk mengambil keputusan politik strategis atau mempimpin birokrasi yang kompleks (Ramadhany, 2019). Fenomena ini menunjukkan bahwa seksisme dalam ruang politik seringkali hadir dalam bentuk simbolik yang terlihat sangat halus bahkan sulit untuk disadari namun tetap memiliki efek delegitimasi (Batubara, 2025).

Secara empiris, temuan ini sejalan dengan adanya konsep kekerasan terhadap perempuan dalam ranah politik yang dikemukakkan oleh Mona lena Krook. Di mana ia menjelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang ada pada ranah politik tidak hanya berbentuk kekerasan atau serangan fisik, tetapi juga mencakup kekerasaan psikologis dan simbolik yang dapat mencakup kekerasan psikologis dan bertujuan melemahkan legitimasi politik perempuan (Krook, 2020). Dalam Pilgub Banten 2024, ujaran yang dikemukakan oleh salah satu paslon membentuk dan mengaitkan kepemimpinan maskulin seperti ketegasan dan

kekuatan menjadi bentuk representasi ideologis yang menempatkan perempuan sebagai pihak yang kurang kompeten di ranah politik.

Hal ini juga dipengaruhi oleh streotip yang ada seperti perempuan lebih "emosional", "kurang tegas" atau "tidak cocok memimpin" merupakan bentuk dari reproduksi nilai patriarki dalam diskursus politik (Padilah et al, 2025). Stereotip ini menjadi perangkat simbolik yang digunakan untuk menjustifikasi dominasi laki-laki di arena kekuasaan politik. Adanya temuan ini dapat memperkuat argumen bahwa demokrasi elektoral daerah tidak sepenuhnya bebas dari bias gender meskipun secara formal memberikan ruang partisipasi politik yang sama bagi laki-laki dan perempuan (Fatharani et al, 2025).

1. 2. Mekanisme Kekerasan Simbolis dalam Delegitimasi Kepemimpinan Perempuan

Indikator kedua menunjukkan bahwa adanya ujaran seksis pada debat Pilgub Banten 2024 dapat masuk kedalam kategori bentuk kekerasan terhadap perempuan dalam politik (*violence against women in politics*) yang sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Mona Lena Krook. Krook menegaskan bahwa kekerasan dalam politik tidak serta-merta terjadi dalam bentuk fisik saja, melainkan juga dapat mencakup dimensi psikologis dan simbolik, yaitu berupa tindakan yang memiliki tujuan untuk merendahkan, mendeligitimasi, ataupun menghambat partisipasi perempuan dalam ruang politik.

Bentuk kekerasan simbolik ini terdapat dalam pernyataan calon wakil gubernur Dimyati Natakusumah dalam konteks debat Pilgub Banten 2024 yang menyatakan bahwa "wanita jangan dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur" (Tirto.id). Pernyataan yang dilontarkan tersebut merupakan salah satu contoh konkret dari apa yang telah dijelaskan oleh Krook dalam karyanya yang berjudul violence against women in politics yang menjelaskan bahwa hal tersebut termasuk sebagai discursive violence, yaitu penggunaan bahasa untuk membatasi legitimasi perempuan dalam politik. Ujaran ini tidak menyerang secara personal, tetapi menggeneralisasi perempuan sebagai kelompok yang kurang cocok untuk dapat memegang kekuasaan, sehingga jika perempuan tetap mencalonkan diri sebagai pemimpin, maka akan mempersempit ruang legitimasi politik bagi mereka.

Dimyati dalam klarifikasinya menyatakan bahwa maksudnya bukan melarang perempuan menjadi gubernur, melainkan menekankan bahwa jabatan tersebut "berat" (Detik.com). Berdasarkan kerangka Krook, pola ini menggambarjan karakteristik penting dari kekerasan simbolik yang ada dalam politik, bahkan sering kali disamarkan sebagai bentuk kepedulian atau norma sosial, sehingga sulit dikenali sebagai tindakan diskriminatif. Hal ini mampu memperkuat temuan Krook untuk dapat membuktikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik seringkali dilegitimasi melalui bahasa yang tampak "netral" atau "protektif".

Pemberitaan lain juga menunjukkan bahwa pernyataan tersebut menuai kontroversi karena dianggap merendahkan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan (Liputan6). Dilihat perspektif Krook, reaksi publik ini mencerminkan adanya resistensi terhadap praktik kekerasan simbolik, akan tetapi hal ini sekaligus menunjukkan bahwa arena politik masih menjadi ruang yang tidak sepenuhnya inklusif bagi perempuan. Bahkan ketika kritik muncul, efek delegitimasi tetap bekerja karena narasi awal telah terlanjur membentuk persepsi publik.

Analisis cek fakta menunjukkan bahwa klaim mengenai ketidakmampuan perempuan memimpin tidak memiliki dasar empiris yang kuat (Deduktif.id). Hal ini mempertegas bahwa ujaran tersebut bukan hanya sekadar opini semata, melainkan merupakan bagian dari misinformasi berbasis gender yang dapat berfungsi untuk mempertahankan struktur ketimpangan. Praktik semacam ini termasuk dalam bentuk kekerasan simbolik yang berkontribusi pada pengucilan tidak langsung (indirect exclusion) perempuan dari politik.

Krook juga menegaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam politik memiliki dampak dengan cakupan yang luas, tidak hanya untuk individu yang menjadi target, tetapi juga untuk perempuan secara kolektif. Konteks pada kasus ini, pernyataan yang meragukan kapasitas perempuan tidak hanya berdampak pada kandidat tertentu, tetapi juga hal ini dapat memperkuat stereotip bahwa perempuan secara umum tidak layak memimpin. Akibatnya, partisipasi perempuan dalam politik dapat terhambat, baik melalui penurunan kepercayaan diri maupun persepsi publik yang bias akibat kalimat yang dilontarkan oleh Cawagub Banten tersebut.

Ujaran seksis dalam debat Pilgub Banten 2024 dapat merepresentasikan bentuk kekerasan simbolik dalam politik yang bekerja melalui bahasa, normalisasi budaya, dan reproduksi stereotip gender. Dalam kerangka Mona Lena Krook, fenomena ini bukan hanya sekadar insiden komunikasi politik biasa, melainkan sudah menjadi bagian dari pola struktural yang secara sistematis membatasi dan mendeligitimasi kepemimpinan perempuan dalam kontestasinya pada ruang politik.

Peneliti mengalisis bahwa adanya narasi yang meragukan kapasitas perempuan dalam menjadi seorang pemimpin di ranah politik, keraguan ini tidak disampaikan secara eksplisit sebagai serangan personal, melainkan dibungkus dalam bentuk argumentasi politik (Sihombing, 2025). Namun secara struktural, narasi tersebut tetap dapat memperkuat asumsi bahwa politik merupakan ruang yang lebih cocok untuk laki-laki (Safitri & Dwiastuti, 2024). Adanya hal ini delegitimasi tidak terjadi melalui pengucilan langsung atau formal tetapi melalui konstruksi makna yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap pemimpin perempuan (Ayu, 2025). Relasi kuasa patriarki masih ditemukan dalam kontestasi

politik lokal lalu bekerja melalui proses natularisasi (Budiarta, 2022). Di mana ketika strereotip gender dilakukan terus berulang makan publik akan menganggap hal itu menjadi hal yang normal. Proses internalisasi dominasi simbolik ini adalah ketika kelompok yang didominasi maupun masyarakat menerima adanya ketidaksetaraan menjadi sebuah hal yang normal (Bato et al, 2025).

Patriarki dalam ranah politik ini mempertahankan ketidakailan gender melalui reproduksi stereotip sosial yang dilegitimasi oleh budaya melalui praktik sosial (Irawan, 2024). Oleh karena itu, ujaran seksis yang ada pada debat politik Pilgub Banten 2024 tidak dapat dipahami sekadar retorika kampanye saja tetapi dapat dilihat dan dikritisi sebegai struktur kekuasaan yang mempertahankan dominasi gender dalam kontestasi politik.

1. 3. Framing Media terhadap Ujaran Seksis dalam Debat

Indikator ketiga berkaitan dengan media yang mulai menyusun sebuah framing pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversial yang terdapat dalam Pilgub Banten 2024. Berdasarkan temuan dan analisis pemberitaan media daring, ditemukan bahwasannya sebagian media menyoroti pernyataan yang berpotensi menimbulkan kontroversi saat debat tersebut berlangsung dan menganggap bahwa pernyataan yang dilontarkan hanya bagian dari isu politik biasa tanpa mengkhususkan sebagai bentuk kekerasan gender dalam politik.

Beberapa media mengenai persoalan ini turut memberitakan bahwasannya Cawagub Banten 2024 telah membuat pernyataan yang kontroversi,berunsur seksis, mendorong ke arah stereotip gender pada kepemimpinan. Oleh karenanyaa media seperti Liputan 6, Tirto.id, Detiknews, dan Deduktif.id membuat framing yang terkandung dalam judul dan isi berita bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Cawagub Banten 2024 tersebut mengandung unsur seksisme sekaligus pernyataan yang kontroversi dan dapat menjadi perdebatan.

Data tambahan yang kami kutip dari web berita Liputan 6.com dalam wawancaranya bersama pengamat politik perludem Titi Anggraini menjelaskan "(Pernyataan itu) sama sekali jauh dari tindakan memuliakan perempuan. Justru pernyataan tersebut sangat mendiskriminasi dan memarginalisasi perempuan dari ranah politik dan publik. Pernyataan tersebut sangat tidak relevan dan sangat memundurkan eksistensi perempuan dalam tata kelola pemerintahan." katanya.

Data yang lain dari web berita Tirto.id yang mewawancarai analis politik Universitas Padjajaran, Kunto Adi Wibowo, ia menilai bahwa tindakan Dimyati yang menyinggung gender Airin merupakan tindakan yang tidak pantas. "Menurut saya, dengan menyerang gender dari lawan debat atau lawan di pemilu itu tindakan yang pecundang sekali [...] Karena tidak ada kelebihan lain yang bisa ditonjolkan kecuali menjadi laki-laki dan harus menang melawan perempuan. Itu jelas seksis kan," kata Kunto kepada Tirto, Kamis (17/10/2024).

Framing seperti ini mempunyai implikasi yang cukup signifikan yang berpengaruh terhadap pemaknaan publik (Amalia et al., 2025). Hal ini terjadi ketika suatu media menempatkan pernyataaan yang berunsur seksis hanya sebuah bagian dari "kontroversi debat" semata sehingga kekerasan simbolis yang sebenarnya terdapat didalamnya menjadi samar dan tidak terdeteksi bagi sebagian orang (Pamungkas & Nuraini, 2024). Dengan kata lain, media secara tidak langsung turut berpartisipasi pada bentuk normalisasi praktik seksisme yang terjadi dalam politik.

Penelitian yang dilakukan mengenai representasi kaum perempuan dalam media juga menunjukkan hal yang serupa. Menurut Juwita dkk. (2024) menemukan bahwasannya media seringkali mereproduksi stereotip berbasis gender dengan cara membuat berita yang tidak sensitif terhadap isu kesetaraan gender. Hal ini membuktikan bahwasannya media tidak hanya sekedar tempat untuk menyalurkan informasi, tetapi juga dapat menjadi sebuah aktor yang berperan dalam membentuk konstruksi sosial mengenai hubungan perempuan dalam politik dan hal ini sangat berpengaruh terhadap isu kesetaraan gender dan hak perempuan dalam ranah politik yang berkembang sekaligus pandangan masyarakat mengenai hal tersebut (Umagapi, 2020).

Dalam demokrasi, seharusnya media tidak selalu menjadi tempat untuk sekedar menyalurkan informasi, tetapi juga mampu memberikan analisis kritis terhadap suatu praktik diskriminasi pada suatu gender tertentu yang terjadi di ruang publik, apabila media gagal melakukan fungsi tersebut, maka reproduksi stereotip gender dalam politik seperti ini akan terus berlanjut tanpa adanya kritikan dari berbagai pihak yang seharusnya dilakukan (Puspadewi et al., 2025).

1. 4. Respons Publik dan Normalisasi Seksisme Politik

Pada indikator ini memiliki kaitan dengan bagaimana masyarakat dapat merespons pernyataan yang bersifat seksis yang terjadi dalam arena debat. Berkembangnya masalah tersebut diiringi oleh respons publik yang beragam terhadap pernyataan Dimyati Natakusumah dalam debat Pilkada Banten 2024, banyak yang mengkritisi secara tajam dan kecaman dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aktivis hingga tokoh politik. Pernyataan yang menyebut "wanita jangan dikasih beban berat, apalagi jadi gubernur" dinilai sebagai bentuk nyata seksisme politik yang merendahkan kapasitas perempuan.

Kecaman dari aktivis dan pegiat gender terutama para aktivis kesetaraan perempuan, seperti Rinawati Prihatiningsih dan kelompok sipil lainnya, sangat menyayangkan adanya narasi tersebut karena hal yang dilontarkan oleh Cawagub Banten 2024 dapat dianggap mendomestifikasi perempuan. Mereka menilai pandangan Dimyati melanggengkan stereotip bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tidak kompeten untuk terlibat dalam pemerintahan.

Kritik dari Tokoh dan Partai Politik juga hadir dalam permasalahan ini. Bendahara Umum Partai Golkar, Sari Yuliati, mengingatkan bahwa Indonesia memiliki sejarah kepemimpinan perempuan yang kuat, termasuk presiden yang berjenis kelamin perempuan, sehingga argumen Dimyati dianggap sangat tidak relevan dan tidak seharusnya diungkapkan.

Sejumlah analis politik menilai Dimyati lebih fokus menyerang gender/jenis kelamin lawan politiknya (Airin Rachmi Diany) daripada beradu visi-misi atau program kerja yang substantif.

Reaksi yang timbul media sosial dan publik secara luas juga beragam. Respons di media sosial, pernyataan tersebut viral dan memicu debat panas. Publik menyoroti inkonsistensi narasi "memuliakan perempuan" yang digunakan oleh Dimyati, yang dalam konteks ini tanpa sadar justru dianggap sebagai seksisme halus (benevolent sexism) tindakan membatasi ruang gerak perempuan dengan dalih kasih sayang atau perlindungan merupakan maksud yang sama sekali tidak tepat dalam konteks debat politik yang lawannya adalah perempuan.

Berdasarkan analisis terhadap beberapa komentar publik yang tersebar di media sosial serta pemberitaan dari berbagai media, respons yang berasal dari masyarakat terpecah menjadi dua perspektif (Prastyo et al., 2024). Sebagian publik memberikan kritik terhadap pernyataan yang dilontarkan karena bersifat diskriminatif terhadap suatu gender seperti pada beberapa komentar juga ditemukan di media sosial Instagram Kompas TV dalam reels nya yang meng-clip bagian pernyataan kontroversial Dimyati, disebutkan oleh beberapa akun yang berkomentar "blunder" "kurang cerdas" "ngomong gak dipikir dulu" “diksriminatif nih” "wanita mana dulu, siapa dulu, jangan terlalu merendahkan seorang wanita” dan masih banyak komentar lainnya dapat membuktikan bahwa publik pun justru mengkritisi pernyataan tersebut, sementara beberapa komentar yang lainnya menganggap bahwa pernyataan tersebut merupakan bagian dari strategi dalam politik sehingga tidak perlu ditanggapi secara serius (Hevriansyah, 2021).

Temuan dua perspektif yang berbeda ini menjadi semakin menarik untuk dibahas karena menunjukkan adanya ambivalensi yang terjadi dalam kesadaran publik terhadap suatu kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam dunia perpolitikan yang seharusnya tidak boleh diwajarkan karena setiap gender mempunyai hak mereka masing masing tanpa pengecualian terlebih lagi dalam politik (Senjaya et al., 2025). Pada satu sisi, meningkatnya isu kesetaraan gender membuat sebagian masyarakat mampu menemukan praktik seksisme (Darmansyah & Sartika, 2021). Akan tetapi di sisi lain, masih terdapat sudut pandang yang menormalisasikan praktik tersebut terjadi dan menganggap bahwasannya penyataan tersebut wajar terjadi pada ranah politik (Febriyanti & Rahmatunnisa, 2022).

Fenomena yang terjadi dapat memperlihatkan bahwasannya perpindahan budaya politik yang menuju ke arah kesetaraan gender masih terdapat hambatan secara struktural dan juga kultural. Wildianti dan Ramadhana (2024) menjelaskan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dalam konteks politik seringkali tidak ditangani secara serius bahkan sama sekali tidak diakui sebagai kekerasan, hal ini disebabkan karena budaya politik patriarkal yang seringkali terjadi pada perempuan sehingga praktik diskriminatif dapat terjadi.

Dengan hal ini, hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi elektoral bukan hanya dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat formal seperti suatu sistem, akan tetapi dapat juga dipengaruhi oleh dinamika representasi sosial yang membentuk legitimasi politik. Ujaran seksis yang terjadi pada debat Pilgub Banten 2024 menunjukkan bagaimana suatu kekerasan yang bersifat simbolis mampu dikemas secara halus dengan berlindung dibalik bahasa politik yang diperkuat oleh framing dari media yang dinormalisasi melalui respon publik yang berbeda-beda (Idris et al., 2025).

Jika secara keseluruhan, penelitian ini menjawab terkait pertanyaan penelitian bahwa praktik seksis yang terjadi dalam debat Pilgub Banten 2024 bukan hanya sebuah retorika politik yang lumrah, akan tetapi berfungsi sebagai mekanisme kekerasan simbolis yang dilegalkan oleh otoritas politik perempuan yang mereproduksi struktur patriarki yang terjadi dalam ranah demokrasi lokal.

Penutup

Berdasarkan keseluruhan analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa ujaran yang muncul dalam debat Pilgub Banten 2024 tidak dapat dipahami sekadar sebagai bagian dari dinamika retorika politik biasa. Pernyataan yang merujuk pada anggapan bahwa perempuan tidak layak memikul "beban berat" kepemimpinan merupakan bentuk seksisme implisit yang bekerja melalui bahasa simbolik. Ujaran tersebut tidak menyerang secara langsung, tetapi secara substansial meragukan kapasitas perempuan dalam kepemimpinan politik, sehingga berkontribusi pada proses delegitimasi.

Kerangka dari violence against women in politics yang dikemukakan oleh Mona Lena Krook menjelaskan bahwa fenomena ini dapat dikategorikan sebagai kekerasan simbolik dan diskursif, yaitu penggunaan narasi, stereotip, dan bahasa untuk membatasi legitimasi perempuan di ruang politik. Praktik ini memperlihatkan bahwa kekerasan politik terhadap perempuan tidak selalu berbentuk fisik, melainkan juga hadir dalam bentuk yang lebih halus namun berdampak sistemik.

Penelitian ini menemukan bahwa media memiliki peran ambivalen. Di satu sisi, media mengangkat kontroversi tersebut, tetapi di sisi lain seringkali membingkainya sebagai sekadar "isu debat politik", bukan sebagai bentuk

kekerasan berbasis gender. Hal ini berpotensi menormalisasi praktik seksisme dalam politik karena mengaburkan dimensi diskriminatif yang terkandung di dalamnya.

Respons publik yang terbelah juga memperkuat temuan bahwa kesadaran masyarakat terhadap isu kesetaraan gender masih berada dalam fase transisi. Sebagian masyarakat telah mampu mengidentifikasi dan mengkritik seksisme, namun sebagian lainnya masih menganggapnya sebagai hal yang wajar dalam politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral di tingkat lokal masih dibayangi oleh struktur patriarki yang bekerja melalui normalisasi stereotip dan praktik simbolik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa ujaran seksis dalam debat Pilgub Banten 2024 merupakan bagian dari mekanisme struktural yang mereproduksi ketimpangan gender dalam politik, bukan sekadar insiden komunikasi politik yang sporadis.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, saran ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam demokrasi elektoral, khususnya aktor politik, media massa, masyarakat dan publik untuk memperkuat sensitivitas gender dalam praktik komunikasi politik. Saran untuk aktor politik, adanya peningkatan kesadaran dan komitmen etis dalam komunikasi politik agar tidak menggunakan narasi yang mengandung bias gender. Partai politik dan kandidat perlu mengedepankan kompetensi, program, dan gagasan yang lebih substantif dibandingkan eksploitasi stereotip gender. Media seharusnya tidak hanya berfungsi sebagai penyampaian informasi semata, tetapi juga sebagai aktor kritis yang mampu mengidentifikasi dan mengkategorikan ujaran seksis sebagai bagian dari kekerasan berbasis gender. Framing yang lebih sensitif terhadap gender juga penting untuk mencegah normalisasi diskriminasi dalam ruang publik. Perlunya peningkatan literasi politik dan kesadaran gender agar masyarakat mampu mengenali bentuk-bentuk kekerasan simbolik yang seringkali terselubung dalam bahasa politik. Respons kritis publik dapat menjadi kunci dalam menekan reproduksi seksisme dalam demokrasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penelitian ini, khususnya kepada penyelenggara pemilu, media massa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam debat Pilgub Banten 2024 sebagai objek kajian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah Gender dan Politik, Ka Ika Arinia Indriyany, M.A, atas arahan, bimbingan, dan dukungan selama proses penelitian. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

Daftar Pustaka

Abbas, F., Wijaya, A. A. M., Lawelai, H., Sa'ban, L. A., & Jovita, H. (2023). Stagnansi Keterpilihan Perempuan dalam Pemilu Indonesia: Sebuah Literature Review: The Stagnation of Women's Electability in Indonesian Elections: A Literature Review. *Muwazah*, *15*(2), 251-272. https://e-journal.uingusdur.ac.id/Muwazah/article/view/2140.

Adriani, S., & Maulia, S. T. (2024). Partisipasi perempuan dalam politik. *Journal of Practice Learning and Educational Development*, *4*(2), 131-136. https://doi.org/10.58737/jpled.v4i2.287.

Amalia, H. P., Tabun, D. S. N., & Jacob, A. R. (2025). Studi Kasus Representasi Caleg Perempuan di DPRD Kabupaten Flores Timur Tahun 2024. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, 3(3), 303-315. https://doi.org/10.70292/pchukumsosial.v3i3.178.

Anjarsari, P., & Pustaka, D. (2025). Perempuan dan Representasi Politik. Detak Pustaka.

Arawi, F. A. (2022). Perbandingan representasi perempuan di parlemen Indonesia dan Filipina. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, *14*(2), 74-85. https://doi.org/10.32734/politeia.v14i2.8600.

Aula, M. R. (2023). Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia. *Jurnal Politikom Indonesiana*, *8*(2), 186-201. https://doi.org/10.35706/jpi.v8i2.9859.

Ayu, L., & Anjani, P. (2026). Partisipasi Politik Perempuan di Indonesia: Tantangan dan Peluang dalam Representasi Parlemen. *Journal of Social and Political Inquiry*, *1*(1), 13-19. https://ejournal.kalibra.or.id/index.php/jospi/article/view/137.

Ayu, V. D. (2025). Peranan Politik Perempuan dalam Pembangunan: Studi tentang Keterwakilan Perempuan dan Dampaknya terhadap Kebijakan Publik. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(5), 6375-6382. https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2262.

Bato, B. E., Zana, I. S., Angreni, D. K. D., Andreastuti, D., Perwitasari, D. R., & Lestari, L. A. (2025). Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif. *Jurnal Administrasi Publik*, *21*(1), 163-187. https://doi.org/10.52316/jap.v21i1.506.

Batubara, A. I. (2025). Kesenjangan Representasi Politik Perempuan: Analisis Gender di Tingkat Desa dan Kota. *Nizamiyah: Jurnal Sains, Sosial dan Multidisiplin*, *1*(3), 185-199. https://doi.org/10.64691/nizamiyah.v1i3.57.

Bintari, A. (2021). Partisipasi dan representasi perempuan dalam penyelenggaraan pemilu. *Jurnal Keadilan Pemilu*, *2*(1), 13-22. https://www.academia.edu/download/102724361/89.pdf.

Budiarta, I. W. (2022). Kepemimpinan Perempuan dalam Sistem Kekerabatan Purusa: Legitimasi Sejarah atas Kepemimpinan Politik Perempuan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, *8*(1), 23-33. https://doi.org/10.23887/jiis.v8i1.40982.

Darmansyah, R., & Sartika, A. (2021). Representasi Perempuan dalam Politik (Studi Pemilihan Legislatif Kota Dumai Periode 2019-2024). Journal Civics and Social Studies, 5(1), 1-15. https://journal.institutpendidikan.ac.id/index.php/journalcss/article/view/247.

Fatharani, A., Hakim, L., & Putri, L. D. M. (2025). Analisis Representasi Kandidat Perempuan Di Pemilu Legislatif Kabupaten Karawang Periode 2024-2029. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, *5*(4), 7795-7804. https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19640.

Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M. (2022). Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki. *ResearchGate, June*, 1-7.

Hasanah, R. L., Zalvadhia, N. K., Mulyady, S., & Nurdin, N. (2025). REPRESENTASI PEREMPUAN DI PARLEMEN: STUDI PERBANDINGAN KEBERHASILAN KUOTA GENDER DI INDONESIA DAN SWEDIA. Jurnal Multidisipliner Kapalamada, 4(02), 218-230. https://doi.org/10.62668/kapalamada.v4i02.1566.

Hevriansyah, A. (2021). Hak Politik Keterwakilan Perempuan dalam Sistem Proporsional Representatif pada Pemilu Legislatif. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, *1*(1), 67-85. http://jurnal.banten.bawaslu.go.id/index.php/awasia/article/view/41.

Idris, I., Wijaya, D., Amalia, N., Susanto, L., & Wijanarko, M. (2025). Laporan Pemantauan Ujaran di Pilkada Serentak 2024. https://aji.or.id/system/files/2025-04/bahasa-version-laporan-pemantauan-ujaran-kebencian-di-pilkada-serentak-2024_0.pdf.

Irawan, A. D. (2024, October). Politik perempuan dalam pemilihan umum tahun 2024 dan tantangan menuju kesetaraan gender. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual* (Vol. 2, No. 5, pp. 151-167). Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. https://repository.umsurabaya.ac.id/id/eprint/9633/2/HASIL%20TURNITIN_Politik%20Perempuan_20%25.pdf

Isamah, N., Candrasari, R., & Iqbal, M. (2024). Ungkapan Seksisme Pada Novel Perempuan Yang Menangis Kepada Bulan Hitam Karya Dian Purnomo. *Kande: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, *5*(1), 73-85. https://doi.org/10.29103/jk.v5i1.16170.

Jannah, P. M. (2021). Pelecehan seksual, seksisme dan bystander. *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*, *2*(1), 61-70. http://dx.doi.org/10.24014/pib.v2i1.12023.

Jannatin, G. K., Chairil, A. M., & Febrianita, R. (2024). Representasi Seksisme & Misogini Perempuan dalam Series Gadis Kretek (Studi Analisis Semiotika John Fiske). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *7*(10), 11768-11777. https://doi.org/10.54371/jiip.v7i10.6130.

Juwita, S. R., Anshori, D. S., Damaianti, V. S., & Mulyati, Y. (2024). Representasi Seksisme Korban Kasus Pelecehan Seksual Anak pada Pemberitaan Media Massa Siber di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *13*(1), 80-93. https://doi.org/10.14710/interaksi.13.1.80-93.

Kusumawati, K., Kusumaningsih, D., & Wicaksana, M. F. (2024). Representasi Perempuan dalam Pemberitaan Puan & Megawati di Instagram (AWK Sara Mills). *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, *20*(1), 313-325. https://doi.org/10.25134/r5ance73.

Makiyah, U. N., & Qisthina, D. S. N. (2024). Politik Representasi Identitas Perempuan dalam Media: Wacana Kritis Pemberitaan KDRT di suara. com. *Academic Journal of Da'wa and Communication*, *5*(1), 65-84. https://doi.org/10.22515/ajdc.v5i1.8158.

Mandasari, N. (2023). Peran Politik Perempuan dalam Persfektif Gender. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, *3*(2), 133-143. https://doi.org/10.61083/ebisma.v3i2.38.

Mardlatillah, S. D. (2022). Perempuan Dan Politik: Peran Perempuan Dalam Dunia Politik Periode 2009-2019. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, *4*(2), 161-167. https://doi.org/10.24235/equalita.v4i2.12901.

Masyuri, R. A., & Febriyanti, D. (2025). Strategi Kemenangan Partai Golkar dalam Meningkatkan Representasi Perempuan pada Pemilihan DPRD Tingkat 1 Kota Palembang. *TheJournalish: Social and Government*, *6*(1), 99-110. https://doi.org/10.55314/tsg.v6i1.898.

Melayu, H. A., & Eriyanti, N. (2024). Kesetaraan Gender dan Representasi Politik: Perjuangan Partisipasi Perempuan dalam Politik di Kabupaten Nagan Raya, Aceh. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam*, *11*(2), 168-182. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Kesetaraan+Gender+dan+Representasi+Politik%3A+Perjuangan+Partisipasi+Perempuan+dalam+Politik+di+Kabupaten+Nagan+Raya%2C+Aceh.+P&btnG=

Mona Lena Krook. Violence Against Women in Politics. Oxford University Press, 2020.

Muwahidah, H. (2019). Representasi politik perempuan Partai Demokrat dalam pemilu legislatif 2014 di Sumbar. *Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*, *1*(1), 1-15. https://doi.org/10.25077/jdpl.1.1.1-15.2019.

Niron, E. S., & Seda, A. B. (2021). Representasi politik perempuan pada lembaga legislatif (Studi tentang pencalonan perempuan pada pemilihan umum

legislatif tahun 2019). *Aristo*, *9*(2), 203-228. https://doi.org/10.24269/ars.v9i2.2158.

Nokia, E., Herwandi, H., & Midawati, M. (2025). Perempuan dalam Representasi Legislatif Daerah Kabupaten Kerinci 2004-2014. Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah, 15(1), 20-26. https://doi.org/10.25077/jas.v15i1.132.

Padilah, A. H., Zulkarnain, Z., & Rudiyanto, Y. (2025). Menembus Batas Patriarki: Perjuangan Perempuan Dalam Dinamika Politik Desa. *Regalia: Jurnal Riset Gender dan Anak*, *4*(1), 18-25. https://doi.org/10.31629/jga.v3i2.7523.

Pamungkas, G., & Nuraini, I. A. (2024). Kesenjangan Gender: Perempuan Dalam Memperoleh Hak Politik. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik| E-ISSN: 3031-8882*, *2*(1), 507-511. https://doi.org/10.62379/1wbn2480.

Paramesti, A., & Vandito, R. L. (2024). Impementasi Kuota Gender dalam Mempengaruhi Eksistensi Perempuan: Studi Kasus Representasi Perempuan di DPRD DKI Jakarta Periode 2019-2024. SETARA: Jurnal Studi Gender dan Anak, 6(02), 18-34. https://doi.org/10.32332/jsga.v6i02.9367.

Prastyo, D., Irawan, D., & Mursyidin, I. H. (2024). Klasifikasi Sentimen Komentar YouTube dengan NLP pada Debat Pilkada Banten 2024. *bit-Tech*, *7*(2), 413-421. https://doi.org/10.32877/bt.v7i2.1833.

Puspadewi, I. D. A., Wastawa, I. W., & Siswadi, G. A. (2025). Perempuan dalam Ruang Komunikasi Politik: Antara Representasi, Kekuasaan, dan Identitas Gender. *Vicara: Jurnal Ilmu Komunikasi*, *1*(4), 14-27. https://e-journal.samsarainstitute.com/vicara/article/view/202.

Qorry, U., Safitri, D., & Sujarwo, S. (2025). Marginalisasi perempuan dalam sistem patriarki. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, *2*(5), 7819-7826.

Rajab, B. (2018). Representasi Perempuan dalam Lembaga Politik di Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *20*(2), 211-222. https://doi.org/10.14203/jmb.v20i2.626.

Ramadhany, D. (2019). *Representasi perempuan dalam pemilu 2019 di Kabupaten Sleman* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).

Rambe, R. D., Dompak, T., & Salsabila, L. (2025). Keterwakilan Perempuan Dalam Politik (Studi Kasus: Caleg Perempuan DPR RI Tahun 2024-2029). Jurnal Pemerintahan Dan Politik, 10(1), 170-191. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i1.5192.

Safitri, W. & Dwiastuti, F. (2024). Representasi Perempuan di Arena Politik. https://www.researchgate.net/profile/Winda-Safitri-4/publication/385810791_Representasi_Perempuan_di_Arena_Politik/links/6735def668de5e5a3075d1aa/Representasi-Perempuan-di-Arena-Politik.pdf.

Santi, E. T. (2020). Representasi citra politisi perempuan di parlemen (Analisis framing dalam pemberitaan Voaindonesia. Com dan Mediaindonesia. Com).

Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah, 7(2), 22-32. https://www.academia.edu/download/79688743/272.pdf.

Sari, A. Y., & Pattipeilohy, S. C. H. (2020). Ketidaksetaraan Gender sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan di Jepang. *Journal of International Relations Diponegoro*, *6*(2), 358-367. https://doi.org/10.14710/jirud.v6i2.27332.

Senjaya, B., Pahrudin, H. M., & Elviria, S. (2025). Representasi perempuan sebagai penyelenggaraan pemilu di Provinsi Jambi: Tantangan dan strategi penguatan. *Journal of Political Issues*, *7*(1), 34-45. https://doi.org/10.33019/jpi.v7i1.323.

Sihombing, H. (2025). *Analisis Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum Anggota Legislaif Kota Jambi Periode 2024* (Doctoral dissertation, ILMU POLITIK). https://repository.unja.ac.id/81721/

Sumarheni, N. (2022). Representasi Perempuan Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bekasi. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, *12*(2), 173-191. https://jurnal.unismabekasi.ac.id/index.php/akp/article/view/2878.

Umagapi, J. L. (2020). Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang. *Kajian*, *25*(1), 19-34. https://www.academia.edu/download/89952104/1886-4781-1-SM.pdf.

Wildianti, D., & Ramadhana, P. (2024). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemilu dan Dampaknya terhadap Keterwakilan Politik Perempuan.. *Masyarakat Indonesia*, *50*(1), 95-108. https://doi.org/10.55981/jmi.2024.8695.